

RANCANGAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025

RENJA



Januari | 2024

BPSDM Provinsi Kalimantan Barat

JL. GUSTI JOHAN IDRUS NO. 12 PONTIANAK
Telp. (0561) 732078 Fax. (0561) 736190
Website : <http://bpsdm.kalbarprov.go.id>

Kata Pengantar

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkat dan karunia-Nya sehingga Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat (BPSDM Provinsi Kalbar) Tahun 2025 dapat diselesaikan penyusunannya.

Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini disusun dalam rangka memberikan gambaran awal mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai oleh BPSDM Provinsi Kalbar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Selain itu dokumen ini juga disusun guna menjelaskan rangkaian rencana, tindakan dan kegiatan yang telah disusun sedemikian rupa, sehingga dapat diimplementasikan oleh segenap jajaran yang ada di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar.

Kami berharap agar dokumen ini dapat memberikan manfaat yang positif dalam mendukung upaya pengembangan potensi dan kompetensi SDM Aparatur di Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, 30 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



MARJANI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660302 198703 1 012

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	41
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	46
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	59
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	60
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	60
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	60
BAB IV RENCANA RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	62
BAB V PENUTUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat (BPSDM Provinsi Kalbar) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan ini kemudian di pertegas melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021 tersebut, BPSDM Provinsi Kalbar mempunyai tugas untuk membantu Gubernur Kalbar melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPSDM Provinsi Kalbar dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan fungsi yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalbar adalah :

- a. Perumusan program kerja di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- d. Penyelenggaraan kegiatan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BPSDM;
- h. Pelaksanaan administrasi BPSDM;
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, BPSDM Provinsi Kalbar beserta seluruh jajarannya telah melakukan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah juga disusun guna mendukung upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renja BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
13. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 137);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

1. Menetapkan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah, khususnya yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalbar;
2. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja BPSDM Provinsi Kalbar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025.

b. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan umum penyusunan Renja Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan berbagai layanan yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalbar terkait upaya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Daerah yang dimiliki oleh Provinsi Kalbar.

Sedangkan tujuan khusus penyusunan Renja Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar adalah :

1. Sebagai acuan untuk mengoperasionalkan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat
2. Sebagai wadah perumusan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
3. Sebagai salah satu pedoman dan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan, yang dirancang guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara efektif dan efisien, khususnya yang terkait dengan upaya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Provinsi Kalbar.
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah di Provinsi Kalbar, guna mewujudkan akuntabilitas kinerja BPSDM Provinsi Kalbar.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2025 dibagi menjadi 5 (lima) bab dan beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bagian ini menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2023.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menjelaskan mengenai telaahan rumusan tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah dan sasaran-sasaran berdasarkan rumusan tujuan tersebut, serta isu-isu penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Bagian ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB V PENUTUP

Bagian ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan bentuk penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah ke dalam dokumen perencanaan tahunan. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga dapat dijadikan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun tertentu.

Pada awal tahun anggaran 2023 telah ditetapkan target pendapatan yang akan dicapai oleh BPSDM Provinsi Kalbar adalah sebesar **Rp. 1.370.000.000**, sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) SKPD Nomor : DPA/A-1/5.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023.

Diinformasikan pula bahwa pada tahun anggaran 2023 telah dilakukan 5 (lima) kali pergeseran/penyempurnaan anggaran, dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja yang dikelola oleh BPSDM Provinsi Kalbar, yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PERGESERAN ANGGARAN TAHAP PERTAMA

Pergeseran I (Pertama) diajukan terkait pergeseran anggaran belanja tertentu pada Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar (kode rekening 5.04.02.1.02.04), terutama anggaran belanja yang dipersiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Dialog Interaktif.

DPA Pergeseran I Tahun Anggaran 2023 ini ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2023 dengan nomor DPA/A.1/5.04.0.00.0.00.01.0000/002/2023. Diinformasikan pula bahwa pada proses ini tidak terdapat usulan penambahan maupun pengurangan anggaran.

2. PERGESERAN ANGGARAN TAHAP KEDUA

Pergeseran II (kedua) kembali diajukan terkait efisiensi dan efektivitas pelaksanaan beberapa sub kegiatan, yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dilakukan pergeseran pada 2 (dua) jenis Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (kode rekening 5.04.01.1.05.02)
 - b) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (kode rekening 5.04.01.1.05.05)
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilakukan pergeseran pada 3 (tiga) jenis Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (kode rekening 5.04.01.1.06.03)
 - b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (kode rekening 5.04.01.1.06.05)
 - c) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (kode rekening 5.04.01.1.06.10)
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilakukan pergeseran pada 2 (dua) jenis Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (kode rekening 5.04.01.1.07.06)
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kode rekening 5.04.01.1.07.11)

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilakukan pergeseran pada 2 (dua) jenis Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kode rekening 5.04.01.1.09.09)
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (kode rekening 5.04.01.1.09.11)

b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, dilakukan pergeseran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (kode rekening 5.04.02.1.01.02)
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dilakukan pergeseran pada 4 (empat) jenis Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (kode rekening 5.04.02.1.02.03)
 - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (kode rekening 5.04.02.1.02.04)
 - c) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (kode rekening 5.04.02.1.02.07)
 - d) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan

Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan (kode rekening 5.04.02.1.02.08)

DPA Pergeseran II Tahun Anggaran 2023 ini ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2023 dengan nomor DPA/A.1/5.04.0.00.0.00.01.0000/003/2023. Diinformasikan pula bahwa pada proses ini tidak terdapat usulan penambahan maupun pengurangan anggaran.

3. PERGESERAN ANGGARAN TAHAP KETIGA

Pergeseran III (ketiga) kembali diajukan terkait efisiensi dan efektivitas pelaksanaan beberapa sub kegiatan, yaitu :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Dilakukan pergeseran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, khususnya pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (kode rekening 5.04.01.1.08.04)
- b) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dilakukan pergeseran pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, khususnya pada 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (kode rekening 5.04.02.1.02.07)
 2. Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan (kode rekening 5.04.02.1.02.08)

DPA Pergeseran III Tahun Anggaran 2023 ini ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2023 dengan nomor DPA/A.1/5.04.0.00.0.00.01.0000/004/2023. Diinformasikan

pula bahwa pada proses ini tidak terdapat usulan penambahan maupun pengurangan anggaran

4. PERGESERAN ANGGARAN TAHAP KEEMPAT

Perubahan Anggaran diusulkan dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 900.1/2075/BKAD–B Tanggal 8 Mei 2023 hal Sisa Anggaran Honorarium Tahun Anggaran 2023 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 000.7.2.4/3208/BAPPEDA.PPEP Tanggal 18 Juli 2023 hal Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Pada proses ini dilakukan perubahan/efisiensi anggaran beberapa sub kegiatan, yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel II.1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	APBD Murni (Rp.)	APBD Perubahan (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang)	
				(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	
1.	Pendapatan	1.370.000.000	2.553.363.000	1.183.363.000	86,38
a.	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1.360.000.000	2.453.363.000	1.093.363.000	80,39
b.	Retribusi Pemakaian Ruang	10.000.000	100.000.000	90.000.000	900,00
2.	Belanja	28.022.010.472	27.737.832.798	(284.177.674)	(1,01)
a.	Belanja Operasi	26.751.478.492	26.177.468.323	(574.010.169)	(2,15)
b.	Belanja Modal	1.270.531.980	1.560.364.475	289.832.495	22,81

DPA Perubahan tahun 2023 ini ditetapkan pada tanggal 1 November 2023 dengan nomor DPA/A.2/5.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023.

5. PERGESERAN ANGGARAN TAHAP KELIMA

Pergeseran Perubahan I diusulkan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 900.1.1.4/5706/TAPD Tahun 2023 tentang Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk Pembayaran Bagi Hasil Pajak. Surat Edaran tersebut mengamanatkan rasionalisasi terhadap belanja-belanja sebagai berikut :

1. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang masih dianggarkan namun tidak dapat direalisasikan;
2. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN setelah pembayaran bulan Desember 2023 diluar anggaran Gaji dan Tunjangan PPPK yang bersumber dari DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian PPPK;
3. Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai setelah memperhitungkan pembayaran bulan November dan Desember 2023
4. Belanja lainnya yang belum menjadi prioritas dan tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun.

Pergeseran Perubahan I Tahun Anggaran 2023 ini dilakukan terhadap beberapa sub kegiatan, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (kode rekening 5.04.01.1.02.01)
 - 2) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (kode rekening 5.04.01.1.03.02)
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (kode rekening 5.04.01.1.06.03)

- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (kode rekening 5.04.01.1.08.02)
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, khususnya Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (kode rekening 5.04.02.1.01.02).

DPA Pergeseran setelah perubahan I tahun anggaran 2023 ini ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2023 dengan nomor DPA/A.2/5.04.0.00.0.00.01.0000/002/2023.

Rincian pergeseran setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang termuat dalam DPPA-SKPD BPSDM Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II.2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	APBD Murni (Rp.)	APBD Perubahan (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang)	
				(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	
1.	Pendapatan	1.370.000.000	2.553.363.000	1.183.363.000	86,38
a.	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1.360.000.000	2.453.363.000	1.093.363.000	80,39
b.	Retribusi Pemakaian Ruangan	10.000.000	100.000.000	90.000.000	900,00
2.	Belanja	28.022.010.472	27.176.599.824	(845.410.648)	(7,61)
a.	Belanja Operasi	26.751.478.492	25.616.235.349	(1.135.243.143)	(4,24)
b.	Belanja Modal	1.270.531.980	1.560.364.475	289.832.495	22,81

Pergeseran tahap kelima lebih dikenal sebagai proses pergeseran setelah perubahan APBD Tahun 2022. Pada tahapan

ini tidak dilakukan pengurangan/penambahan terhadap besaran pagu anggaran, melainkan hanya pergeseran beberapa rekening belanja tertentu terkait kebutuhan, seperti pergeseran anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, serta pergeseran untuk belanja-belanja tertentu yang memang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Selain perubahan terhadap anggaran belanja yang dikelola BPSDM Provinsi Kalbar pada tahun anggaran 2023, juga dilakukan perubahan terhadap target pendapatan perangkat daerah BPSDM Provinsi Kalbar dari **Rp. 1.370.000.000** menjadi Rp. 2.453.363.000 atau bertambah sebesar Rp. 1.183.363.000 atau 80,39%. Langkah ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Adanya penambahan target peserta pelatihan dari luar instansi Pemerintah Provinsi Kalbar, khususnya untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
2. Meningkatnya permintaan penyewaan fasilitas yang tersedia di BPSDM Provinsi Kalbar, baik Aula, Ruang Kelas maupun Asrama.

Adapun rincian anggaran beserta realisasi pendapatan yang menjadi target BPSDM Provinsi Kalbar pada tahun 2023 secara ringkas dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel I.3

Anggaran dan realisasi pencapaian target pendapatan
SKPD BPSDM Provinsi Kalbar
Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Anggaran		Realisasi Anggaran	
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	Pendapatan	1.370.000.000	2.553.363.000	2.744.753.000	107,50
a.	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1.360.000.000	2.453.363.000	2.453.363.000	100,00

No.	Uraian	Anggaran		Realisasi Anggaran	
		Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
b.	Retribusi Pemakaian Ruang	10.000.000	100.000.000	291.390.000	291,39

Diinformasikan bahwa realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun anggaran 2023 melebihi dari yang telah ditetapkan. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian ini adalah dilakukannya sosialisasi tentang penyewaan fasilitas berupa aula, ruang kelas dan asrama BPSDM melalui media sosial, yang ternyata menarik minat masyarakat dan instansi lain di Luar Pemerintah Provinsi Kalbar untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Sedangkan rincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.4
Perubahan Anggaran Belanja Per Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Beserta Realisasi Pemanfaatan Anggaran Tahun 2023
SKPD BPSDM Provinsi Kalbar

No. Kode Rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi			Indikator Keluaran (Target Kinerja)	
		DPA Murni (Rp.)	DPA Perubahan (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	Indikator	Output
				(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	28.022.010.472	27.176.599.824	26.358.843.357	96,99	99,85		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	28.022.010.472	27.176.599.824	26.358.843.357	96,99	99,85		
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.133.354.113	18.681.240.845	18.400.415.038	98,50	99,94		
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.729.200	114.076.200	98.093.825	85,99	100,00		
5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.520.900	26.966.900,00	22.740.025,00	84,33	100,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
5.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.907.800	18.492.800,00	18.039.950,00	97,55	100,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7 dokumen

No. Kode Rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi			Indikator Keluaran (Target Kinerja)	
		DPA Murni (Rp.)	DPA Perubahan (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	Indikator	Output
				(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.921.000	42.861.000,00	34.311.600,00	80,05	100,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.379.500	25.755.500,00	23.002.250,00	89,31	100,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.086.322.994	12.390.795.546	12.270.174.088	99,03	100,00		
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.751.920.494	12.074.579.846	11.956.562.824,00	99,02	100,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 orang/bulan
5.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.560.000	5.560.000	5.365.164,00	96,50	100,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen
5.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	294.120.000	294.120.000	292.120.000,00	99,32	100,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan

No. Kode Rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi			Indikator Keluaran (Target Kinerja)	
		DPA Murni (Rp.)	DPA Perubahan (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	Indikator	Output
				(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.722.500	16.535.700	16.126.100,00	97,52	100,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	121.704.800	88.016.800	83.574.786	94,95	100,00		
5.04.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	49.000.000	47.000.000	46.061.461,00	98,00	100,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Polis Asuransi
5.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72.704.800	41.016.800	37.513.325,00	91,46	100,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	646.724.951	533.427.002	525.443.936	98,50	100,00		
5.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	242.575.000	209.504.800	209.504.800	100,00	100,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket

No. Kode Rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi			Indikator Keluaran (Target Kinerja)	
		DPA Murni (Rp.)	DPA Perubahan (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	Indikator	Output
				(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.04.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	116.091.300	63.420.900	55.612.380	87,69	100,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	87 Dokumen
5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	288.058.651	260.501.302	260.326.756	99,93	100,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	69 Orang
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	720.583.625	695.019.525	651.688.820	93,77	98,41		
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73.744.825	72.526.225	71.843.482	99,06	100,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket
5.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.929.500	87.879.000	84.373.554	96,01	100,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
5.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	129.557.000	137.642.000	135.396.640	98,37	100,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket

No. Kode Rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi			Indikator Keluaran (Target Kinerja)	
		DPA Murni (Rp.)	DPA Perubahan (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	Indikator	Output
				(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.402.500	75.282.500	60.828.100	80,80	100,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.475.000	73.475.000	56.002.837	76,22	85,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
5.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.600.000	33.600.000	33.330.000	99,20	100,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	742 Dokumen
5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.957.000	181.957.000	178.381.507	98,03	100,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	39 Laporan
5.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	38.917.800	32.657.800	31.532.700	96,55	100,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.244.263.331	1.418.880.475	1.407.342.350	99,19	100,00		
5.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	692.936.600	681.892.600	680.498.000	99,80	100,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket

No. Kode Rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi			Indikator Keluaran (Target Kinerja)	
		DPA Murni (Rp.)	DPA Perubahan (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	Indikator	Output
				(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	439.379.531	687.915.675	679.882.000	98,83	100,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit
5.04.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111.947.200	49.072.200	46.962.350	95,70	100,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit/Buah
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.187.625.821	2.185.724.903	2.142.897.039	98,04	100,00		
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	691.000.221	515.490.321	481.827.852	93,47	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.496.625.600	1.670.234.582	1.661.069.187	99,45	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	968.399.391	1.255.300.394	1.221.200.194	97,28	100,00		

No. Kode Rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi			Indikator Keluaran (Target Kinerja)	
		DPA Murni (Rp.)	DPA Perubahan (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	Indikator	Output
				(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.870.000	87.600.000	83.390.720	95,19	100,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit
5.04.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	15.000.000	15.000.000	14.707.500	98,05	100,00	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit
5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	188.252.200	183.752.200	180.754.648	98,37	100,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	331 Unit
5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	333.277.191	532.244.269	509.599.186	95,75	100,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit
5.04.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	255.000.000	436.703.925	432.748.140	99,09	100,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.888.656.359	8.495.358.979	7.958.428.319	89,53	99,63		
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	2.746.382.900	2.630.373.220	2.540.830.275	96,60	99,81		

No. Kode Rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi			Indikator Keluaran (Target Kinerja)	
		DPA Murni (Rp.)	DPA Perubahan (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	Indikator	Output
				(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.04.02.1.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	112.054.700	19.034.700	18.936.300	99,48	74,25	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 dokumen
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2.529.983.100	2.529.983.100	2.447.257.128	96,73	100,00	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3.997 orang

No. Kode Rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi			Indikator Keluaran (Target Kinerja)	
		DPA Murni (Rp.)	DPA Perubahan (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	Indikator	Output
				(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.04.02.1.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	104.345.100	81.355.420	74.636.847	91,74	100,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	2 dokumen
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	6.142.273.459	5.864.985.759	5.417.598.044	92,37	99,55		
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	178.728.700	329.364.000	244.541.918	74,25	100,00	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	92 orang
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	630.277.800	526.267.800	466.359.288	88,62	100,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	5 Laporan

No. Kode Rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi			Indikator Keluaran (Target Kinerja)	
		DPA Murni (Rp.)	DPA Perubahan (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	Indikator	Output
				(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4.814.926.859	4.676.174.859	4.447.735.013	95,11	99,44	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.015 Orang

No. Kode Rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi			Indikator Keluaran (Target Kinerja)	
		DPA Murni (Rp.)	DPA Perubahan (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	Indikator	Output
				(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	518.340.100	333.179.100	258.961.825	77,72	100,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Dokumen

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1) Kegiatan yang dibatalkan

Pada tahun 2023 tidak terdapat sub kegiatan yang dibatalkan pelaksanaannya.

2) Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

☞ *Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum*

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Secara keseluruhan, selain yang terdapat pada huruf a, program dan kegiatan tahun 2023 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang diinginkan.

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) sub kegiatan yang capaiannya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- ☞ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ☞ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ☞ Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, khususnya Sub Kegiatan *Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum*, yang termuat pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.
- d. **Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;**
 - 1) Faktor-faktor Penyebab tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - ☞ *Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum*
Output (keluaran) Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis, Umum, Inti dan Pilihan Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun.

Target sub kegiatan ini adalah 2 dokumen namun yang terealisasi hanya 1 dokumen, yaitu Evaluasi Pasca Pelatihan Teknis, sedangkan penyusunan modul batal dilaksanakan pada pertengahan triwulan III meskipun \pm 45% proses telah dilaksanakan. Hal ini dikarenakan Kurikulum Pelatihan tersebut ternyata belum disusun, sedangkan untuk merubah jenis output kinerja menjadi kurikulum sudah tidak memungkinkan, mengingat waktu yang tersisa tidak cukup untuk melakukan penyusunan kurikulum

☞ *Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan*

Output (keluaran) dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah jumlah alumni Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sebanyak 2.018 orang PNS dan terealisasi sebesar 99,85% dari total target alumni sebanyak 2.015 orang.

Hal ini disebabkan terdapat pembatalan pengiriman peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional, meskipun penjurangan calon peserta telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

- 2) Faktor-faktor Penyebab melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang capaiannya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu

a. *Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*

Capaian yang lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan ini dikarenakan dari target 2 dokumen yang akan disusun (Renja Tahun 2024 dan Rancangan Renstra Tahun 2024-2026), ternyata terdapat penyusunan 1 (satu) tambahan dokumen, yaitu Perubahan Renja Tahun 2023.

b. *Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*

Capaian yang lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan ini dikarenakan dari target 3 dokumen yang akan disusun (DPA Tahun 2023, RKA Tahun 2024 dan DPA Perubahan Tahun 2023), ternyata terdapat penambahan 4 Jenis Dokumen yang disusun sepanjang tahun 2023, yaitu

1. DPA Pergeseran I
2. DPA Pergeseran II
3. DPA Pergeseran III
4. DPA Pergeseran Perubahan I

c. *Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*

Capaian yang lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan ini dikarenakan dari target 30 orang ASN BPSDM yang akan mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi, ternyata jumlah ASN yang dapat mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi sampai dengan akhir tahun 2023 berjumlah 69 orang.

d. *Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, yang termuat pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.*

Capaian yang sangat tinggi ini dikarenakan terdapat kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang dilaksanakan secara

daring melalui aplikasi zoom meeting, yang ternyata sangat menarik minat bagi para ASN yang tidak hanya ASN pada lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar, tetapi juga para ASN di luar Provinsi Kalbar, yaitu kegiatan *Virtual Sharing* dengan branding **Sistem Belajar untuk Pengembangan Kompetensi (Sijar Bangsi)**. Namun terkait hasil Audit kinerja dari Inspektorat Provinsi Kalbar pada tahun 2023, maka jumlah alumni yang dihitung untuk mendukung capaian kinerja BPSDM adalah jumlah alumni yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Secara umum, berdasarkan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023, diinformasikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tingkat pencapaian sasaran “sangat berhasil”.

Diakui bahwa terdapat beberapa sub kegiatan yang capaiannya tidak maksimal sesuai target yang telah ditetapkan, namun secara umum hal ini tidak memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menggambarkan keberhasilan BPSDM Provinsi Kalbar dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan kompetensi SDM Aparatur di Provinsi Kalbar

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Karena tidak terdapat permasalahan maupun faktor-faktor yang menyebabkan dampak negatif terhadap pencapaian sasaran yang termuat didalam Renstra Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2018 – 2023, maka tidak diperlukan adanya tindakan untuk mengatasi permasalahan. Namun dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, telah diambil langkah-langkah berupa persiapan sumber daya aparatur

pendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, diantaranya dengan mengikutsertakan PNS yang ada di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar didalam berbagai kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, baik yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalbar sendiri, maupun yang diselenggarakan oleh instansi lain.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, BPSDM Provinsi Kalbar merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Gubernur Kalbar melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui Perubahan Kedua RENSTRA perangkat daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023, telah pula ditetapkan Indikator Kinerja Utama, dengan tujuan agar capaian kinerja BPSDM Provinsi Kalbar lebih terarah dan dapat terukur tingkat keberhasilan pencapaiannya.

Terkait dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menyampaikan informasi bahwa pernyataan tujuan jangka menengah dan indikator tujuan sebagaimana dikemukakan diatas merupakan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah diubah/disempurnakan. berdasarkan dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2018–2023, hanya terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan untuk dicapai oleh BPSDM Provinsi Kalbar. Hal ini terkait dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, sehingga Program prioritas (core business) yang menjadi kewenangan BPSDM Provinsi Kalbar untuk mencapai sasaran strategis hanya 1 (satu), yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hal inilah yang menjadi dasar dan penyebab mengapa sasaran strategis yang menjadi kewenangan

BPSDM Provinsi Kalbar hanya 1 (satu) sasaran strategis sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.5
Perubahan/Penyempurnaan Sasaran Strategis
Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar

No.	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah		Indikator Sasaran Perangkat Daerah	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan pengembangan SDM Pemerintah Daerah	1. Jumlah SDM Pemerintahan Daerah yang lulus pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional 2. Jumlah SDM Pemerintahan Daerah yang lulus pengembangan kompetensi teknis 3. Jumlah SDM Pemerintahan Daerah yang lulus pengembangan kompetensi tenaga pengembangan kompetensi	Persentase Pelayanan Pengembangan Profesionalisme SDM Pemerintah Daerah
2.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Institusi	-	Akreditasi kelembagaan Institusi dan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi.	-
3.	Meningkatnya ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	Jumlah SDM Aparatur yang memperoleh Sertifikasi Kompetensi	-

Kemudian, terkait dengan arahan dari tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada saat Pelaksanaan Workshop SAKIP di Provinsi Kalbar, dan dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Nomor 065/3473/RO-ORG Tanggal 22 September 2022 hal Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah, kembali dilakukan penyesuaian dalam bentuk perubahan dan penambahan terhadap sasaran perangkat daerah BPSDM Provinsi Kalbar, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel II.6
Perubahan/Penyempurnaan Sasaran Strategis
Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar

No.	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah		Indikator Sasaran Perangkat Daerah	
	Termuat pada Renstra Perubahan Kedua Tahun 2018–2023	Perubahan dan Penambahan arahan dari tim Kemenpan RB pada saat Pelaksanaan Workshop SAKIP di Provinsi Kalbar Tahun 2022 dan Surat Sekda Provinsi Kalbar Nomor 065/3473/RO-ORG Tanggal 22 September 2022	Termuat pada Renstra Perubahan Kedua Tahun 2018–2023	Perubahan dan Penambahan arahan dari tim Kemenpan RB pada saat Pelaksanaan Workshop SAKIP di Provinsi Kalbar Tahun 2022 dan Surat Sekda Provinsi Kalbar Nomor 065/3473/RO-ORG Tanggal 22 September 2022
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pelayanan pengembangan profesionalisme SDM Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Persentase Pelayanan Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia Aparatur
2.	<i>(belum ada)</i>	Meningkatnya Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	<i>(belum ada)</i>	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Diinformasikan bahwa perubahan ini tidak termuat dalam dokumen Renstra Perubahan Kedua Tahun 2018-2023, namun mengingat perubahan ini adalah arahan dari Tim Kemenpan RB dan Surat Sekda Provinsi Kalbar Nomor 065/3473/RO-ORG Tanggal 22 September 2022, maka pada tahun 2023 Indikator Sasaran ini tetap termuat dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPSDM Provinsi Kalbar dengan Gubernur Kalbar.

Terkait dengan penjelasan diatas, data pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang tercermin melalui Indikator Kinerja Utama untuk tahun anggaran 2023, secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel III.7
Pencapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1.	Meningkatnya pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Persentase Pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia Aparatur	15,80%	56,42%	56,42%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	78,50	78,65	80,90%	Sangat Berhasil
		2. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	BB	-	-	

Diinformasikan bahwa bahwa bahwa Indikator kinerja “Indeks RB Perangkat Daerah” pada tahun 2023 tidak dapat diukur, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, mulai pertengahan tahun 2023 tidak lagi dilakukan penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah. Terhadap hal ini telah dikonsultasikan kepada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar terkait revisi Perjanjian Kinerja Kepala BPSDM Provinsi Kalbar Tahun

2023, namun disarankan untuk tidak melakukan revisi perjanjian kinerja tahun 2023. Kondisi ini disarankan untuk dijelaskan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian kedua sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran “**Meningkatnya pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur**”, adalah :
 - a. Penambahan target alumni pada sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, dari 780 (target RPJMD) orang menjadi 1.090 orang.
 - b. Terdapat kegiatan Virtual Sharing dengan branding Sistem Belajar Untuk Pengembangan Kompetensi (Sijar Bangsi) yang jumlah peserta mengikuti kegiatan tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pada saat pembentukan kegiatan ini memang tidak ditetapkan target yang tinggi, hanya direncanakan akan diikuti sebanyak 300 orang ASN untuk 4 (empat) kali pelaksanaan kegiatan. Target ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2023 sudah cukup banyak penyelenggara pelatihan yang melaksanakan kegiatan dengan model serupa, sehingga dikhawatirkan apabila ditetapkan target yang tinggi tidak akan tercapai. Namun ternyata antusiasme ASN mengikuti pengembangan kompetensi melalui virtual sharing Sijar Bangsi masih cukup tinggi pada tahun 2023. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan tugas PNS secara umum, baik di wilayah Kalbar maupun di seluruh Indonesia.
 - c. Penambahan target alumni pada sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan

Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, dari 929 (target RPJMD) orang menjadi 2.018 orang.

- d. Upaya segenap jajaran di lingkungan BPSDM untuk mendukung pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga kedua sasaran strategis dapat dicapai dengan predikat **“sangat berhasil”**
2. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran **“Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”**, adalah upaya BPSDM Provinsi Kalbar beserta seluruh jajarannya untuk terus memperbaiki kinerja dan birokrasi di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar pada sepanjang tahun 2023.

Meskipun kedua sasaran strategis telah dapat dicapai dengan predikat sangat berhasil, namun harus diakui bahwa masih terdapat beberapa faktor penghambat pencapaian kedua sasaran strategis ini, yaitu :

1. Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Kalbar Tahun 2018 – 2023 belum mengakomodir seluruh usulan mengenai perubahan besaran target riil yang seharusnya dicapai oleh BPSDM Provinsi Kalbar. Dokumen tersebut hanya mengakomodir perubahan sasaran dan indikator kinerja utama (IKU), tetapi belum mengakomodir besaran target yang seharusnya akan dicapai pada setiap tahun anggaran (dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023).
2. Karena perubahan besaran target IKU tidak terakomodir mengakibatkan pencapaian keluaran (output) dari beberapa sub kegiatan tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk pengukuran pencapaian target IKU. Hanya terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur perhitungan target IKU, yaitu :
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, yang termuat dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis;

- b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan, yang termuat dalam kegiatan Sertifikasi Kelembangan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Sedangkan **4 (empat) sub kegiatan** lain yang mengakomodir upaya peningkatan kualitas kelembagaan dan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar **tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan** pencapaian IKU secara langsung, karena target yang termuat dalam dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2018–2023 tersebut bukanlah target yang diusulkan oleh BPSDM Provinsi Kalbar pada saat proses perubahan, melainkan target awal pada saat penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023 (sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023).

4 (empat) sub kegiatan yang tidak dapat diakomodir untuk menjadi tolok ukur perhitungan pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- c. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- d. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan

Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan.

3. Indikator kinerja “Indeks RB Perangkat Daerah” pada tahun 2023 yang tidak dapat diukur terkait perubahan kebijakan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BPSDM Provinsi Kalbar merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk dengan tujuan utama membantu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai peraturan dan perundang-undangan. Selain itu BPSDM Provinsi Kalbar juga memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat terutama dalam hal pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana di BPSDM. Oleh sebab itu BPSDM Provinsi Kalbar terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan kualitas SDM Aparatur di Provinsi Kalbar dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengembangan kompetensi SDM Aparatur di Provinsi Kalbar, BPSDM Provinsi Kalbar memiliki beberapa faktor pendukung yang dipandang dapat mengoptimalkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu :

- a. Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan upaya pengembangan kompetensi sumber daya aparatur;
- b. Pengembangan kelembagaan pelatihan dengan Kalbar CorpU;

- c. Perkembangan teknologi dalam menunjang pengembangan kompetensi, serta pelayanan informasi bagi pengembangan kompetensi;
- d. Tingginya kebutuhan terhadap pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang diinginkan oleh perangkat daerah.
- e. Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur.

b. Tugas-tugas pelayanan yang dilaksanakan Perangkat Daerah

Adapun layanan yang diberikan oleh BPSDM Provinsi Kalbar dalam upaya memenuhi tugas dan tanggungjawab tersebut secara umum adalah sebagai berikut :

1. Layanan pengembangan kompetensi SDM Aparatur

Sebagaimana terkait dengan penjelasan sebelumnya, layanan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalbar adalah dalam bentuk penyelenggaraan berbagai kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan workshop, serta kegiatan lainnya yang dipandang mampu untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM Pemerintahan Daerah guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Layanan Sertifikasi Kompetensi SDM Aparatur

Sebagaimana terkait penjelasan sebelumnya layanan sertifikasi kompetensi dilaksanakan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan Uji Kompetensi yang dibutuhkan oleh SDM Aparatur, khususnya Uji Kompetensi bagi PNS yang akan atau berminat untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan formasi yang tersedia, baik ditingkat Provinsi / Kabupaten / Kota se-Kalimantan Barat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam rangka mengoptimalkan layanan yang diberikan tersebut, juga

dilaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kualitas pengembangan kompetensi SDM Aparatur, agar layanan yang diberikan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

c. Permasalahan dan Hambatan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Kalbar selama periode 2018-2023 terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Kalbar, baik SDM aparatur, sarana dan prasarana, maupun anggaran yang diberikan dalam melaksanakan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang berjumlah sebanyak 10.574 orang belum dapat direalisasikan kepada semua ASN. Kondisi yang dihadapi ini perlu diupayakan secara maksimal untuk diatasi dengan cara mengembangkan kompetensi ASN di BPSDM, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta melakukan perubahan dan penyesuaian dalam pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Kalbar.
2. Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, kadangkala dihadapkan dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian/ lembaga yang berubah-ubah sangat cepat, baik kurikulum pelatihan maupun pembiayaan kegiatan pelatihan. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap perencanaan yang telah ditetapkan dan berpengaruh juga terhadap realisasi program.
3. Pelayanan pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Kalbar dengan cara memanfaatkan teknologi digital belum mendapatkan dukungan secara optimal dari aspek pewadahan atau kelembagaan sehingga pengembangan kompetensi dengan cara memanfaatkan teknologi digital belum dapat dilaksanakan terintegrasi dan maksimal.

d. Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi BPSDM Provinsi Kalbar dalam melaksanakan tugas dan fungsi tentu saja berpengaruh dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Adapun dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yaitu belum seluruh ASN di Provinsi Kalimantan Barat dapat memenuhi haknya dalam pengembangan kompetensi minimal 20 (dua puluh) jam pelajaran setiap tahun. Guna mengatasi hal tersebut BPSDM Provinsi Kalbar dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dan melakukan pengembangan kompetensi melalui sarana digitalisasi (aplikasi *zoom meeting*).

Selain itu, BPSDM Provinsi Kalbar terus berupaya melakukan berbagai langkah guna mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi, antara lain dengan terus berupaya memantapkan kinerja BPSDM Provinsi Kalbar agar semakin optimal dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan Pengembangan Kompetensi.

e. Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh BPSDM Provinsi Kalbar antara lain :

- ☞ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana pada pasal 203 secara jelas mengamanatkan bahwa Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dilakukan

paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Hal ini menjadi salah satu tantangan utama bagi BPSDM Provinsi Kalbar, untuk dapat menciptakan inovasi baru guna memenuhi kebijakan dimaksud dengan porsi anggaran yang efektif dan efisien.

- ☞ Adanya tuntutan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi SDM Aparatur yang lebih efektif dan berkualitas;
- ☞ Adanya tuntutan peningkatan kualitas SDM Aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik;
- ☞ Banyaknya lembaga kediklatan aparatur lainnya yang juga menawarkan program pengembangan kompetensi ASN dengan sistem daring (e-learning/webinar).

Sedangkan peluang yang tersedia dan dapat dimanfaatkan dalam upaya pengembangan pelayanan BPSDM Provinsi Kalbar antara lain sebagai berikut :

- ☞ Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan upaya pengembangan dan peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Daerah;
- ☞ Tingginya tingkat kebutuhan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi dan sertifikasi kompetensi SDM Pemerintahan Daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ☞ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menunjang kegiatan pengembangan kompetensi dan sertifikasi kompetensi SDM Pemerintahan Daerah, serta memudahkan penerimaan dan penyampaian data/informasi pengembangan kompetensi dan sertifikasi kompetensi SDM Pemerintahan daerah

f. Formulasi Isu-isu Penting Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Kalimantan Barat tersebut diatas, analisa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan telaah Rencana Strategis BPSDM Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023, maka isu strategis yang berkenaan langsung dengan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2024-2026 yaitu **“Kompetensi ASN, regulasi dan pewadahan fungsi pengembangan kompetensi yang belum optimal”**.

Sedangkan isu strategis lainnya yang dihadapi BPSDM Provinsi Kalbar yaitu masih belum mampu untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengenai hak dan kesempatan yang sama bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahun.

Faktor yang mempengaruhi hal ini yaitu keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Kalbar, termasuk anggaran yang diberikan serta ketersediaan sarana dan prasarana sehingga BPSDM hanya mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi SDM aparatur bagi \pm 1.700 orang PNS, sedangkan PNS Provinsi Kalbar yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat berjumlah sebanyak 10.574 orang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun guna menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan Renstra Perangkat Daerah dengan kebijakan pada RPJMD Perubahan Provinsi

Kalbar Tahun 2024–2026, guna meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Sebagaimana termuat didalam rancangan awal RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2025, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalbar didalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, terutama Urusan Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Kalbar, baik SDM aparatur, sarana dan prasarana, maupun anggaran yang diberikan dalam melaksanakan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang berjumlah sebanyak ± 11.910 orang belum dapat direalisasikan kepada semua ASN. Kondisi yang dihadapi ini perlu diupayakan secara maksimal untuk diatasi dengan cara mengembangkan kompetensi ASN di BPSDM, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta melakukan perubahan dan penyesuaian dalam pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Kalbar.
2. Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, kadangkala dihadapkan dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga yang berubah-ubah sangat cepat, baik kurikulum pelatihan maupun pembiayaan kegiatan pelatihan. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap perencanaan yang telah ditetapkan dan berpengaruh juga terhadap realisasi program.
3. Pelayanan pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Kalbar dengan cara memanfaatkan teknologi digital belum mendapatkan dukungan yang optimal dari aspek pewadahan dan SDM yang menguasai IT sehingga pengembangan kompetensi dengan cara memanfaatkan teknologi digital belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

BPSDM Provinsi Kalbar telah menyampaikan usulan rencana program prioritas yang disusun sebagai salah satu langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, terutama pemenuhan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan.

Adapun perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan secara ringkas melalui tabel dibawah ini :

Tabel II.8
Review Awal Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
5.04.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				27,576,962,166	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				27,576,962,166
5.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indikator Program I : Indeks SAKIP Perangkat Daerah	BB	19,039,659,816	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indikator Program I : Indeks SAKIP Perangkat Daerah	BB	19,039,659,816
			Indikator Program II : Indeks RB Perangkat Daerah	95%	19,039,659,816			Indikator Program II : Indeks RB Perangkat Daerah	95%	19,039,659,816
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen	57,620,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen	57,620,000
5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	9,700,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	9,700,000
5.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,300,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,300,000
5.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,550,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,550,000
5.04.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	5,570,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	5,570,000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20,500,000
5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	12,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	12,000,000
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	14,759,922,200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	14,759,922,200
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/Bulan	14,452,242,200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/Bulan	14,452,242,200
5.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5,560,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5,560,000
5.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	294,120,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	294,120,000
5.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	8,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	8,000,000
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan/Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Dokumen/Laporan	64,800,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan/Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Dokumen/Laporan	64,800,000
5.04.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	3,500,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	3,500,000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
5.04.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	49,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	49,000,000
5.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12,300,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12,300,000
5.04.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	20,700,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	20,700,000
5.04.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5,120,000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5,120,000
5.04.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	8,520,000	Pengolahan Data Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	8,520,000
5.04.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	7,060,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	7,060,000
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	317,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	317,000,000
5.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	10,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	10,000,000
5.04.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	88 Dokumen	32,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	88 Dokumen	32,000,000
5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	275,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	275,000,000
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	658,786,100	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	658,786,100

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	71,607,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	71,607,000
5.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	85,009,400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	85,009,400
5.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	82,582,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	82,582,000
5.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	99,138,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	99,138,000
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	68,550,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	68,550,000
5.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2214 Dokumen	33,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2214 Dokumen	33,600,000
5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	19,440,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	19,440,000
5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	174,200,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	174,200,000
5.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	24,659,700	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	24,659,700
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,298,203,100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,298,203,100
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	688,508,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	688,508,000
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,609,695,100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,609,695,100

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	862,628,416	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	862,628,416
5.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	176,870,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	176,870,000
5.04.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20,000,000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20,000,000
5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	325 Unit	195,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	325 Unit	195,000,000
5.04.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	31,000,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	31,000,000
5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	232,842,416	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	232,842,416
5.04.01.1.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	206,916,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	206,916,000
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				8,537,302,350	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				8,537,302,350
			Indikator Program I : Persentase Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Daerah	100 %	1,021,502,700			Indikator Program I : Persentase Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Daerah	100 %	1,021,502,700

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
			Indikator Program II : Persentase ASN yang memiliki kompetensi teknis	41.43 %	3,329,983,100			Indikator Program II : Persentase ASN yang memiliki kompetensi teknis	41.43 %	3,329,983,100
			Indikator Program III : Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi manajerial dan fungsional	58.57 %	4,185,816,550			Indikator Program III : Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi manajerial dan fungsional	58.57 %	4,185,816,550
			Indikator Program IV : Persentase Anggota DPRD Kab/Kota yang memiliki kompetensi pemerintahan	0 %	-			Indikator Program IV : Persentase Anggota DPRD Kab/Kota yang memiliki kompetensi pemerintahan	0 %	-
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis				3,533,431,300	Pengembangan Kompetensi Teknis				3,533,431,300
			Indikator Kegiatan I : Jumlah Dokumen pendukung Pengembangan Kompetensi Teknis	4 Dokumen	203,448,200			Indikator Kegiatan I : Jumlah Dokumen pendukung Pengembangan Kompetensi Teknis	4 Dokumen	203,448,200
			Indikator Kegiatan II : Jumlah alumni pengembangan kompetensi teknis	1500 Orang	3,329,983,100			Indikator Kegiatan II : Jumlah alumni pengembangan kompetensi teknis	1500 Orang	3,329,983,100
5.04.02.1.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Dokumen	106,115,400	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Dokumen	106,115,400

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1500 Orang	3,329,983,100	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1500 Orang	3,329,983,100
5.04.02.1.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	2 Dokumen	97,332,800	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	2 Dokumen	97,332,800
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				5,003,871,050	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				5,003,871,050
			Indikator Kegiatan I : Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	80 Orang	178,917,600			Indikator Kegiatan I : Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	80 Orang	178,917,600

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
			<i>Indikator Kegiatan II : Jumlah Dokumen hasil pengelolaan, pembinaan, pengkoordinasian, dan pengembangan kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar</i>	5 Dokumen	818,054,500			<i>Indikator Kegiatan II : Jumlah Dokumen hasil pengelolaan, pembinaan, pengkoordinasian, dan pengembangan kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar</i>	5 Dokumen	818,054,500
			<i>Indikator Kegiatan III : Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	2121 Orang	4,006,898,950			<i>Indikator Kegiatan III : Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	2121 Orang	4,006,898,950
			<i>Indikator Kegiatan IV : Jumlah Anggota DPRD Kab/Kota yang mengikuti orientasi anggota DPRD</i>	-	-			<i>Indikator Kegiatan IV : Jumlah Anggota DPRD Kab/Kota yang mengikuti orientasi anggota DPRD</i>	-	-
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	80 Orang	178,917,600	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	80 Orang	178,917,600
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan	453,054,500	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan	453,054,500
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2121 Orang	4,006,898,950	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2121 Orang	4,006,898,950

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Dokumen	365,000,000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Dokumen	365,000,000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPSDM Provinsi Kalbar memang belum secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Barat. Tetapi BPSDM Provinsi Kalbar memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mendukung upaya peningkatan kinerja dan kualitas SDM Pemerintahan Daerah yang secara langsung bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik di Provinsi Kalbar.

Diinformasikan pula bahwa pada tahun 2023 tidak dilaksanakan kegiatan Forum Perangkat Daerah. Langkah ini diambil dengan pertimbangan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalbar sampai saat ini terbatas pada pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), belum mencakup pengembangan potensi masyarakat umum di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sesuai dengan peraturan pembentukan perangkat daerah BPSDM Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan berbagai kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi ASN merupakan salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas SDM aparatur, sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan proses pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN diarahkan kepada peningkatan kinerja organisasi dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berpedoman kepada visi dan misi kepala daerah dan wakil daerah, serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran yang disusun terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Kalbar, dan termuat dalam dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, minimal 1 (satu) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai oleh BPSDM Provinsi Kalbar adalah **“Meningkatnya Kualitas SDM, Efektivitas dan Efisiensi Layanan Publik”**, dengan indikator tujuan adalah **“Indeks Sistem Merit”**.

b. Sasaran Renja SKPD

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh BPSDM Provinsi Kalbar terkait dengan tujuan yang ingin dicapai adalah **“Meningkatnya pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur”**, dengan indikator sasaran **“Persentase Pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia Aparatur”**.

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah adalah salah satu cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat mengetahui capaian keberhasilan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Guna melaksanakan tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2025, telah ditetapkan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, berdasarkan dokumen Renstra Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2024–2026, yaitu :

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Faktor yang menjadi pertimbangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan besaran target yang telah termuat dalam dokumen Renstra Perangkat daerah Tahun 2024–2026, yang telah pula disesuaikan pula dengan kapasitas keuangan pemerintah daerah pada tahun penyusunan rencana kerja.

b. Garis Besar Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) program, 10 kegiatan, serta 43 sub kegiatan yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi memuat berbagai kegiatan rutin/pendukung yang dilaksanakan oleh BPSDM dalam 1 (satu) tahun anggaran. Program ini memuat 8 (delapan) kegiatan yang memuat 36 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

(1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini memuat 6 (enam) sub kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang terkait dengan proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan capaian kinerja dilingkungan BPSDM Provinsi Kalbar dalam 1 (satu) tahun anggaran, yaitu:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

(2) Administrasi Keuangan Daerah

Kegiatan ini memuat 4 (empat) sub kegiatan terkait pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan daerah yang mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi BPSDM Provinsi Kalbar secara optimal, yaitu:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kegiatan ini memuat 3 (tiga) sub kegiatan terkait pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah pada BPSDM Provinsi Kalbar, yaitu:
- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Pengamanan Barang Milik SKPD;
 - c. Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD
- (4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini memuat 3 (tiga) sub kegiatan terkait perencanaan dan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam bentuk retribusi, yaitu:
- a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah;
 - b. Pengolahan Data Retribusi Daerah
 - c. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Diinformasikan bahwa pada saat ini BPSDM Provinsi Kalbar masih memiliki 1 jenis target pendapatan, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan ini memuat 3 (tiga) sub kegiatan terkait pengelolaan dan peningkatan kualitas administrasi kepegawaian pada lingkup perangkat daerah, yaitu:
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;

(6) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memuat 9 (sembilan) sub kegiatan yang terkait pelaksanaan administrasi umum pada lingkup perangkat daerah yaitu:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- i. Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD.

(7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memuat 2 (dua) sub kegiatan terkait dengan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi para pegawai di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

(8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memuat 6 (enam) sub kegiatan terkait penyediaan jasa pemeliharaan yang dibutuhkan BPSDM Provinsi Kalbar, yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pemeliharaan Mebel;

- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya;
- d. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya;
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya;

2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan program inti/prioritas yang memuat berbagai kegiatan yang secara langsung mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengembangan kompetensi SDM Aparatur di Provinsi Kalbar. Program ini memuat 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kompetensi Teknis

Kegiatan ini memuat berbagai sub kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis bagi sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, seperti pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis/workshop, penyusunan standar perangkat pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi paska diklat, serta pemberian ijin penyelenggaraan pelatihan. Kegiatan ini memuat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Standar Perangkat pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,

Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum,

- c. Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

- (2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Kegiatan ini memuat berbagai sub kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis bagi sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, seperti pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis/workshop, penyusunan standar perangkat pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi paska diklat, serta pemberian izin penyelenggaraan pelatihan. Kegiatan ini memuat 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- a. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota;
- b. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar;
- c. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional Kepemimpinan, dan Prajabatan;
- d. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,

Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional
Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Adapun usulan kebutuhan pembiayaan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalbar pada tahun 2025 mendatang, beserta target capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan, secara ringkas dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	PENUNJANG				27,576,962,166				30,759,758,952
5.04.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				27,576,962,166				30,759,758,952
5.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indikator Program I : Indeks SAKIP Perangkat Daerah		BB	19,039,659,816			BB	19,330,384,900
		Indikator Program II : Indeks RB Perangkat Daerah		95%	19,039,659,816			95%	19,330,384,900
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30 Dokumen	57,620,000			30 Dokumen	192,500,000
5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	3 Dokumen	9,700,000	PAD		3 Dokumen	35,000,000
5.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	1 Dokumen	5,300,000	PAD		1 Dokumen	25,000,000
5.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Pontianak	1 Dokumen	4,550,000	PAD		1 Dokumen	25,000,000
5.04.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Pontianak	2 Dokumen	5,570,000	PAD		2 Dokumen	17,500,000
5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	4 Laporan	20,500,000	PAD		4 Laporan	55,000,000
5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	19 Laporan	12,000,000	PAD		19 Laporan	35,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	14,759,922,200			100 %	13,851,284,900
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	85 Orang/Bulan	14,452,242,200	DAU		85 Orang/Bulan	13,461,135,000
5.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Pontianak	1 Dokumen	5,560,000	PAD		1 Dokumen	-
5.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	12 Dokumen	294,120,000	PAD		12 Dokumen	355,149,900
5.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak	2 Laporan	8,000,000	PAD		2 Laporan	35,000,000
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5 Dokumen/Laporan	64,800,000			5 Dokumen/Laporan	111,475,000
5.04.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak	2 Dokumen	3,500,000	PAD		2 Dokumen	20,125,000
5.04.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak	2 Dokumen	49,000,000	PAD		2 Dokumen	56,350,000
5.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pontianak	1 Laporan	12,300,000	PAD		1 Laporan	35,000,000
5.04.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100 %	20,700,000			100 %	80,125,000
5.04.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Pontianak	1 Dokumen	5,120,000	PAD		1 Dokumen	20,125,000
5.04.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Kota Pontianak	4 Laporan	8,520,000	PAD		4 Laporan	35,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Pontianak	4 Laporan	7,060,000	PAD		4 Laporan	25,000,000
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	317,000,000			100 %	525,000,000
5.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pontianak	1 Paket	10,000,000	PAD		1 Paket	115,000,000
5.04.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Pontianak	88 Dokumen	32,000,000	PAD		88 Dokumen	120,000,000
5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Pontianak	30 Orang	275,000,000	PAD		30 Orang	290,000,000
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	658,786,100			100 %	752,500,000
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak	3 Paket	71,607,000	PAD		3 Paket	75,000,000
5.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak	2 Paket	85,009,400	PAD		2 Paket	85,000,000
5.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pontianak	3 Paket	82,582,000	PAD		3 Paket	150,000,000
5.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak	3 Paket	99,138,000	PAD		3 Paket	85,000,000
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pontianak	4 Paket	68,550,000	PAD		4 Paket	75,000,000
5.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pontianak	2214 Dokumen	33,600,000	PAD		2214 Dokumen	37,500,000
5.04.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Pontianak	4 Laporan	19,440,000	PAD		4 Laporan	20,000,000
5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	20 Laporan	174,200,000	PAD		20 Laporan	185,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Pontianak	1 Dokumen	24,659,700	PAD		1 Dokumen	40,000,000
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	2,298,203,100			100 %	2,500,000,000
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pontianak	12 Laporan	688,508,000	PAD		12 Laporan	800,000,000
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak	12 Laporan	1,609,695,100	PAD		12 Laporan	1,700,000,000
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	862,628,416			100 %	1,317,500,000
5.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pontianak	8 Unit	176,870,000	PAD		8 Unit	145,000,000
5.04.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Pontianak	20 Unit	20,000,000	PAD		20 Unit	22,500,000
5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pontianak	325 Unit	195,000,000	PAD		325 Unit	200,000,000
5.04.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Pontianak	2 Unit	31,000,000	PAD		2 Unit	50,000,000
5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pontianak	5 Unit	232,842,416	PAD		5 Unit	500,000,000
5.04.01.1.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pontianak	5 Unit	206,916,000	PAD		5 Unit	400,000,000
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				8,537,302,350				11,429,374,052

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Indikator Program I : Persentase Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Daerah		100 %	1,021,502,700			100 %	1,725,150,000
		Indikator Program II : Persentase ASN yang memiliki kompetensi teknis		41.43 %	3,329,983,100			47.10 %	3,200,000,000
		Indikator Program III : Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi manajerial dan fungsional		58.57 %	4,185,816,550			52.90 %	6,504,224,052
		Indikator Program IV : Persentase Anggota DPRD Kab/Kota yang memiliki kompetensi pemerintahan		0 %	-			0 %	-
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis				3,533,431,300				3,455,000,000
		<i>Indikator Kegiatan I : Jumlah Dokumen pendukung Pengembangan Kompetensi Teknis</i>		4 Dokumen	203,448,200			4 Dokumen	255,000,000
		<i>Indikator Kegiatan II : Jumlah alumni pengembangan kompetensi teknis</i>		1500 Orang	3,329,983,100			1700 Orang	3,200,000,000
5.04.02.1.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Kota Pontianak	2 Dokumen	106,115,400	PAD		2 Dokumen	140,000,000
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kota Pontianak	1500 Orang	3,329,983,100	PAD		1700 Orang	3,200,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.02.1.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Kota Pontianak	2 Dokumen	97,332,800	PAD		2 Dokumen	115,000,000
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				5,003,871,050				7,974,374,052
		<i>Indikator Kegiatan I : Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi</i>		80 Orang	178,917,600			80 Orang	216,490,296
		<i>Indikator Kegiatan II : Jumlah Dokumen hasil pengelolaan, pembinaan, pengkoordinasian, dan pengembangan kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar</i>		5 Dokumen	818,054,500			5 Dokumen	1,470,150,000
		<i>Indikator Kegiatan III : Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>		2121 Orang	4,006,898,950			1909 Orang	6,287,733,756
		<i>Indikator Kegiatan IV : Jumlah Anggota DPRD Kab/Kota yang mengikuti orientasi anggota DPRD</i>		- -	-			- -	-
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Kota Pontianak	80 Orang	178,917,600	PAD		80 Orang	216,490,296
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Kota Pontianak	1 Laporan	453,054,500	PAD		1 Laporan	1,028,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Pontianak	2121 Orang	4,006,898,950	PAD		1909 Orang	6,287,733,756
5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Pontianak	4 Dokumen	365,000,000	PAD		4 Dokumen	441,650,000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar merupakan salah satu wujud nyata dari upaya pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai isu strategis terkait dengan manajemen pengelolaan sumber daya aparatur daerah, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat terlihat dari perencanaan dan penetapan berbagai program dan kegiatan pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah, yang diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah Provinsi Kalbar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Renja Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar tahun 2025 ini disusun, dengan harapan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya dalam upaya menciptakan SDM pemerintahan daerah yang profesional, bertanggungjawab, dan memiliki disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah.

Pontianak, 30 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT




MARJANI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660302 198703 1 012